

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT RINCIAN TERKAIT KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBERIKAN INSENTIF

**1. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN UNTUK
DIBERIKAN INSENTIF UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA**

NAMA PERUSAHAAN: ...

NOMOR INDUK BERUSAHA: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG DIMOHONKAN INSENTIF

S.D. 31 DESEMBER 2025 = (A)..... UNIT

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA: (25%x(A)) UNIT

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH					(25%x(A))	

2. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN UNTUK DIBERIKAN INSENTIF UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (DST)

NAMA PERUSAHAAN: ...

NOMOR INDUK BERUSAHA: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI YANG DIMOHONKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025 = (A)..... UNIT

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (dst): UNIT

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH				

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT KOMITMEN

SURAT KOMITMEN

Nomor :
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Jabatan :
Tempat Tinggal :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Induk Berusaha :

Dalam rangka permohonan Surat Persetujuan Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat, atas Bidang Usaha Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2023 tentang, perusahaan berkewajiban untuk:

1. memproduksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

....., 20..
Yang menyatakan,

(Nama Perusahaan)
(Jabatan)

Materai Rp. 10.000,-

(Nama)

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT

No.: ...

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 2023 tentang, menyampaikan bahwa:

Nomor Permohonan :
Nama Perusahaan : PT.
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Perusahaan :
NPWP :
Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
Kapasitas Produksi :
Lokasi Usaha :
Nomor Kegiatan Usaha :
Total Rencana Investasi : Rp
Jumlah Total Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang Diberikan Insentif : ... Unit

Rincian rencana impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana terlampir dalam Surat Usulan ini.

Surat Usulan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Diterbitkan oleh : Lembaga OSS
Dikeluarkan tanggal : dd mmm yyyy



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

LAMPIRAN
SURAT USULAN PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT

No.: ...

RENCANA INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIMOHONKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025= (A)..... UNIT

A. RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIBERIKAN INSENTIF

1. UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA

REALISASI INVESTASI: Rp0

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN PERTAMA: (25%x(A)) UNIT

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	NILAI INSENTIF BEA MASUK (Rp)	NILAI INSENTIF PPnBM (Rp)
1
2
Dst
	JUMLAH				
	NILAI TOTAL GARANSI BANK (= NILAI INSENTIF BEA MASUK + NILAI INSENTIF PPnBM) (B1)								...	

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal penerbitan surat usulan. Dalam hal Hari tanggal penerbitan surat usulan tidak terdapat data Kurs Tengah BI, digunakan kurs tengah pada Hari terakhir sebelum tanggal penerbitan surat usulan.

2. UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (Dst)

REALISASI INVESTASI: Rp...

JUMLAH TOTAL UNTUK PERIODE PENGIMPORAN KEDUA (Dst): UNIT

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	NILAI INSENTIF BEA MASUK (Rp)	NILAI INSENTIF PPnBM (Rp)
1
2
Dst
	JUMLAH				
	NILAI TOTAL GARANSI BANK (= NILAI INSENTIF BEA MASUK + NILAI INSENTIF PPnBM) (B2)								...	

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) pada 1 (satu) Hari sebelum tanggal penerbitan surat usulan. Dalam hal Hari tanggal penerbitan surat usulan tidak terdapat data Kurs Tengah BI, digunakan kurs tengah pada Hari terakhir sebelum tanggal penerbitan surat usulan.

B. RINCIAN PROYEKSI JUMLAH TOTAL PENGIMPORAN DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT PER PERIODE YANG DIBERIKAN SECARA PROPORSIONAL BERDASARKAN REALISASI INVESTASI

JUMLAH TOTAL KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT YANG DIBERIKAN INSENTIF S.D. 31 DESEMBER 2025 (A) = UNIT
 TOTAL RENCANA INVESTASI (C): Rp...

NO	PERIODE	REALISASI INVESTASI (IDR) PADA PERIODE 6 BULAN SEBELUMNYA	JUMLAH PROPORSIONAL KBL BERBASIS BATERAI YANG DIBERIKAN INSENTIF	NILAI GARANSI BANK (RP)
1	(6 bulan pertama)	0% x (C)	25% x (A) = UNIT	(B1) = Rp...
2	(6 bulan kedua dst)	...% x (C)	...% x (A) = UNIT	(B2) = Rp...
3	Dst...	...% x (C)	...% x (A) = UNIT	(B...) = Rp...
	JUMLAH	100% x (C)	100% (A) = UNIT	(B1+B2+B..)

SIAP BERPRODUKSI KOMERSIL: 1 Januari 2026

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA
PEMBERIAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
RODA EMPAT DALAM RANGKA
PERCEPATAN INVESTASI

DAFTAR HS CODE DAN REFERENSI TARIF

KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang Diimpor	HS CODE	URAIAN BARANG	PPnBM	BEA MASUK MFN
CBU	8703.80.97	Sedan	15%	50%
	8703.80.98	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	50%
	8703.80.99	Lain-lain	15%	50%
CKD	8703.80.17	Sedan	15%	10%
	8703.80.18	Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van)	15%	10%
	8703.80.19	Lain-lain	15%	10%

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA PEMBERIAN
INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI RODA EMPAT DALAM
RANGKA PERCEPATAN INVESTASI

FORMAT SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR
DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI RODA EMPAT



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

No.:
TENTANG

PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT
KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI
ATAS NAMA PT ...
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi;
 - b. bahwa perusahaan telah memiliki NIB No. tanggal ...;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Kepabeanan;
 2. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Perpajakan
 3. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan

Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan;

6. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Dalam Rangka Percepatan Investasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI ATAS NAMA PT... DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL.

KESATU : Menteri Investasi/Kepala BKPM Republik Indonesia menetapkan pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat kepada Pelaku Usaha yaitu:

1. Nama Perusahaan :
2. NPWP :
3. Alamat Perusahaan :
4. No. Telp/Email :
5. Lokasi Usaha :
- Alamat :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
6. Perizinan Berusaha :
- Nomor Induk Berusaha (NIB) :
- Tanggal terbit NIB :
- Sertifikat Standar (SS) :
- Tanggal terbit SS :
7. KBLI :
8. Bidang Usaha :
9. Rencana Investasi :
10. Nomor Kegiatan Usaha :
11. Jumlah Total Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang Diberikan Insentif :Unit
12. Total Harga Perkiraan CIF untuk Impor : US\$.....

KEDUA : Insentif sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA mencakup:

- a. Insentif Bea Masuk Tarif 0% (nol persen) atas impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini; dan

- b. Insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditanggung Pemerintah atas impor dan/atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat sebagaimana dimaksud pada Lampiran Surat Persetujuan ini.

KETIGA

- : a. Atas insentif sebagaimana DIKTUM KEDUA, Pelaku Usaha wajib memenuhi komitmen:
1. memproduksi kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor kendaraan bermotor listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan, dengan ketentuan:
 - a) siap berproduksi komersial paling lambat tanggal 1 Januari 2026;
 - b) diproduksi paling lambat tanggal 31 Desember 2027; dan
 - c) memenuhi target minimum capaian TKDN sebagaimana diatur dalam peraturan presiden mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan;
 2. mengajukan verifikasi industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan
 3. membayar sanksi apabila tidak dapat memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- b. Atas komitmen sebagaimana pada huruf a dijamin dengan Garansi Bank Nomor ... yang diterbitkan oleh Bank ... senilai Rp... ;
- c. Atas rencana impor oleh pelaku usaha sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA dengan harga perkiraan total CIF sebesar US\$... akan ditetapkan kemudian pengimporan sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
- d. Dalam pelaksanaan impor berlaku ketentuan larangan dan pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang telah diimpor berdasarkan surat persetujuan ini tidak dapat diekspor kembali.

KELIMA

- : Surat Persetujuan ini berlaku dari tanggal ... sampai dengan tanggal

KEENAM

- : Perusahaan wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan dan Laporan Realisasi Impor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah realisasi impor melalui Sistem OSS.

KETUJUH

- : Perusahaan hanya dapat melakukan pemasukan barang pada pelabuhan tujuan yang tercantum pada Surat Persetujuan ini.

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan pemanfaatan barang, perusahaan wajib membayar bea masuk yang terhutang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah ditanggung Pemerintah, serta dikenai sanksi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Jakarta, dd/mm/yyyy

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia,



(Nama)

Ditandatangani secara elektronik

Salinan disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM;
9. Kepala DPMPSTSP Provinsi
10. Kepala KPPBC
11. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
12. Direksi PT.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN PEMANFAATAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT KEPADA INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI

NAMA PERUSAHAAN: ...

JANGKA WAKTU PENGIMPORAN: tanggal ... sampai dengan tanggal ...

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

SP No.

Tanggal

NO	JENIS BARANG	HS CODE	SPESIFIKASI TEKNIS	NEGARA ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JUMLAH (UNIT)	HARGA PERKIRAAN CIF (US\$/UNIT) UNTUK IMPOR	TOTAL HARGA PERKIRAAN CIF (US\$) UNTUK IMPOR	PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP/UNIT)	TOTAL PERKIRAAN HARGA JUAL DI INDONESIA (RP)
1
2
Dst
	JUMLAH				

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.:

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KELOLA
PEMBERIAN INSENTIF IMPOR DAN/ATAU
PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR
LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA
EMPAT DALAM RANGKA PERCEPATAN
INVESTASI

FORMAT SURAT PENGENAAN SANKSI



MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PENGENAAN SANKSI

No.:

Tanggal: ...

Kepada Yth.

Nama : PT. ... (Pelaku Usaha)

NPWP :

Alamat :

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi dan dengan telah diterbitkannya Surat Persetujuan No.: ... tentang Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Kepada Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atas Nama PT... dalam rangka Penanaman Modal, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, maka dapat disampaikan bahwa PT ... dengan NIB ... telah melakukan realisasi pengimporan sebanyak ... atas jenis kendaraan terlampir.
2. Hingga 31 Desember 2027, berdasarkan data kegiatan usaha pada Sertifikat Standar Terverifikasi PT ... atas KBLI 29101 Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dengan Nomor Kegiatan Usaha ... dan lokasi proyek ..., kapasitas produksi yang tercantum adalah ... unit/tahun.

3. Berdasarkan Surat Keterangan Verifikasi Industri Nomor ... atas nama PT ... atau tidak diterimanya surat keterangan verifikasi industri atas nama PT ..., bahwa realisasi produksi dalam rangka pemenuhan komitmen sesuai Surat Persetujuan dinyatakan tidak memenuhi sebagian atau seluruh komitmen.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT ... TIDAK memproduksi KBL Berbasis Baterai Roda Empat di Indonesia setidaknya dengan jumlah dan spesifikasi teknis yang minimal sama dengan impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat yang direalisasikan.
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor ... tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) untuk transportasi jalan, atas nama PT ... **BELUM (atau TELAH)** memenuhi target minimum capaian TKDN.

Atas pertimbangan tersebut diatas, maka PT ... **dikenakan sanksi** atas Pemanfaatan Insentif Impor dan/atau Penyerahan KBL Berbasis Baterai Roda Empat dengan detail jumlah pengenaan sanksi sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal

...

Tembusan:

- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Menteri Perindustrian RI;
- Menteri Perdagangan RI.

LAMPIRAN SURAT PENGENAAN SANKSI

NILAI KURS: 1 US\$ = Rp ...

A. PENGHITUNGAN NILAI INSENTIF BEA MASUK TARIF 0%			
1.	Nilai Insentif Bea Masuk yang diberikan tarif 0%	CBU: 50% x CIF/unit x Jumlah CKD: 10% x CIF/unit x Jumlah	Rp
2.	Nilai Insentif Bea Masuk yang disalahgunakan	CBU: 50% x CIF/unit x Jumlah CKD: 10% x CIF/unit x Jumlah	Rp (A)

B. PENGHITUNGAN NILAI INSENTIF PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) DITANGGUNG PEMERINTAH			
1.	Nilai Insentif PPnBM yang diberikan	CBU/CKD: 15% x {CIF/unit x Jumlah x (1+ Tarif BM)}	Rp
2.	Nilai Insentif PPnBM yang disalahgunakan	CBU/CKD: 15% x {CIF/unit x Jumlah x (1+ Tarif BM)}	Rp (B)

C. KESIMPULAN		
1.	Total Sanksi yang Harus Dibayar	Rp (= A + B)

*) Nilai Kurs yang digunakan untuk konversi Dollar Amerika Serikat (US\$) ke Rupiah (Rp) menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana tercantum pada Surat Usulan Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat No.:

FORMAT SURAT REKOMENDASI PEMBATALAN/PENCAIRAN GARANSI
BANK



MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT REKOMENDASI PEMBATALAN/PENCAIRAN GARANSI BANK

No.:

Tanggal: ...

Kepada Yth.

Nama : PT ... (Bank Penerbit Garansi Bank)

Alamat :

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam Rangka Percepatan Investasi dan dengan telah diterbitkannya Surat Penetapan Pengenaan Sanksi Nomor ... dan Bukti Pembayaran Sanksi Nomor..., dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa PT ...dengan NIB ... **tidak dikenakan/dikenakan sanksi** atas Pemanfaatan Insentif Impor KBL Berbasis Baterai Roda Empat.
2. Sehingga Bank Garansi dengan Nomor ... dan Tanggal ... dapat **dibatalkan/dicairkan dengan besaran Rp ...** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal

...

Tembusan:

- PT ... (pelaku usaha)
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
- Menteri Keuangan RI;
- Menteri Perindustrian RI;
- Menteri Perdagangan RI.

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA